



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK HARI CAHYONO
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. PASAR MINGGU
3. NHK : 871767

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.090.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **368.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI 4 TAG Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. MOTOR, BENELLI BENELLI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **10.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

1.468.500.000

III. HUTANG

Rp.

180.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.288.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.